

Jurnal Ekonomi

VOLUME XVII / 02 / 2012

ISSN : 0854 - 9842

Daftar Isi

Neoliberalisme Global Dan Implikasinya Pada Dominasi Asing Dan Masalah Kemiskinan Di Indonesia
Agus Eko Nugroho

Faktor-Faktor Kelembagaan Yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia 2000-2011
R. Bambang Budhijana

Kebijakan Pembentukan *Holding* Badan Usaha Milik Negara Sektor Energi, Telekomunikasi, Dan Perbankan
Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

Pengangguran Dan Setengah Pengangguran Perkotaan Di Indonesia 2008-2011
Iwan Prasodjo

Dampak Krisis Ekonomi Dunia Terhadap Kepercayaan Publik
Elizabeth Sugiarto Dermawan

Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dengan Menggunakan Model ARCH
Nugroho Agung Wijoyo

Infrastruktur Dan Kebijakan Fiskal Di Indonesia
Yanuar

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Nuryasman MN

Pengaruh Kapasitas Bank Terhadap *Capital Adequacy Rasio* (CAR) Pada Perbankan *Listing* Di BEI
Herman Ruslim

JURNAL EKONOMI

VOLUME XVII/02/Julii/2012

ISSN0854-9842

Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analisis-krisis di bidang Ilmu Ekonomi.

Pelindung

Chairy

Penanggungjawab

Sukrisno Agoes

Ketua Koordinator Penyunting

Carunia Mulya Firdausy

Anggota Penyunting

Warih Pambudi Nugroho

Suherman

Nuryasaman MN

R. Bambang Budhijana

Penyunting Kehormatan (Mitra Bestari)

Almasdi Zahya

J. Supranto

Indah Susilowati

Tiktik Sartika Partomo

Kodrat Wibowo

Soegeng Wahyoedi

Eddy Herjanto

Redaksi Pelaksana

Christina Catur W

Ni Made Manik

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Sekretariat Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta, Kampus II Gedung B Lantai 3, Jln. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470 Telepon (021) 5655508-10-14-15 pesawat 0327 dan Fax. (021) 5655512. email: maksi@tarumanagara.ac.id

Jurnal Ekonomi diterbitkan sejak tahun 1996 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Dicetak di Percetakan Candi Mas Metropole-Jakarta. Isi di luar tanggung jawab Percetakan

NEOLIBERALISME GLOBAL DAN IMPLIKASINYA PADA DOMINASI ASING DAN MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

Agus Eko Nugroho

.....

138 - 155

FAKTOR-FAKTOR KELEMBAGAAN YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 2000-2011

R. Bambang Budhijana

.....

156 - 166

KEBIJAKAN PEMBENTUKAN *HOLDING* BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKTOR ENERGI, TELEKOMUNIKASI, DAN PERBANKAN

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

.....

167 - 181

PENGANGGURAN DAN SETENGAH PENGANGGURAN PERKOTAAN DI INDONESIA 2008-2011

Iwan Prasodjo

.....

182 - 193

DAMPAK KRISIS EKONOMI DUNIA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK

Elizabeth Sugiarto Dermawan

.....

194 - 205

PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH

Nugroho Agung Wijoyo

.....

206 - 224

INFRASTRUKTUR DAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

Yanuar

.....

225 - 236

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH

Nuryasman MN

.....

237 - 255

PENGARUH KAPASITAS BANK TERHADAP CAPITAL ADEQUACY
RASIO (CAR) PADA PERBANKAN LISTING DI BEI

Herman Ruslim

.....

256 - 265

INFRASTRUKTUR DAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

Yanuar

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta
(Email: yanuar.arifin03@gmail.com)

Abstract: This article aims at analyzing (1) the condition of Indonesia infrastructure compared to ASEAN countries: Philippines, Vietnam, and Thailand which have the same GDP per capita as Indonesia that is *lower middle income countries*, (2) the financial sources (expenditures and revenues) which are used to develop and to improve quality of infrastructure from GDP and APBN (National Revenues and Expenditures Budget). Data used in the study were derived from a variety of sources: Finance Department of RI, World Bank, Asian Development Bank, and others. The data were analyzed by using descriptive method. The result revealed that the Indonesia infrastructures are left behind compared to three ASEAN countries (Philippines, Vietnam, and Thailand). To improve the quality of Indonesia infrastructures, two ways should be done: a) reducing (or taking off) the subsidiary of fuel oil for private cars, b) increasing tax ratio because it is lower than the tax ration in the three ASEAN countries.

Key words: Finance, infrastructure, quality, GDP.

Abstaksi: Tulisan ini mencoba menganalisis: 1) kondisi infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan tiga negara Asean seperti: Filipina, Vietnam, dan Thailand dalam kelompok PDB per kapita yang sama yaitu *lowemiddle income countries*, 2) menganalisis sumber-sumber dana (pengeluaran dan pendapatan) untuk meningkatkan persentase infrastruktur terhadap APBN dan PDB sehingga bisa memperbaiki kualitas infrastruktur. Sumber data yang digunakan dari berbagai sumber seperti: Departemen Keuangan RI, Bank Dunia (*World Bank*), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*), dan lain-lain). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil analisis dengan menggunakan indikator infrastruktur disimpulkan kondisi infrastuktur Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan ketiga negara Asean (Filipina, Vietnam, dan Thailand). Untuk meningkatkan kualitas infrastuktur Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara: a) mencabut/mengurangi subsidi BBM untuk mobil pribadi, b) meningkat penerimaan pajak (*tax ratio*) karena *tax ratio* Indonesia masih jauh dibawah *tax ratio* negara Asean yang dijadikan pembanding.

Kata kunci: Keuangan, infrastruktur, kualitas, PDB.

PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan dasar untuk meningkatkan daya saing, kinerja ekonomi dan kualitas hidup melalui *Capital Stock* dengan penyediaan barang dan jasa publik. Infrastruktur transportasi seperti: jalan raya, jembatan, dan rel kereta api, serta pelabuhan sangat besar perannya untuk kelancaran pasokan bahan baku dan distribusi barang. Hal

ini akan menekan ongkos produksi dan distribusi barang dan jasa. Infrastruktur energi seperti: listrik akan mempelancar proses produksi dan menekan ongkos produksi. Infrastruktur telekomunikasi seperti: telepon dan internet adalah untuk memperpendek jarak dan waktu dalam komunikasi serta menekan ongkos komunikasi. Infrastruktur kesehatan (rumah sakit dan sanitasi) dan air bersih adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta kualitas hidup masyarakat.

Menurut Adam Smith tiga peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara yaitu: 1) menjaga pertahanan dan keamanan dalam negeri; 2) penyelenggara keadilan; dan 3) menyediakan barang-barang publik, seperti infrastruktur publik dan fasilitas umum lainnya.

Pembangunan fasilitas layanan infrastruktur publik merupakan bagian penting untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam proses pembangunan (Stiglitz, 2000, Jhinghan, 2002, Fay dan Yapes, 2003) dan diperkuat oleh penelitian Kim (2006) meneliti pengaruh infrastruktur (Transportasi, Energi dan Komunikasi) terhadap produktivitas di Jepang dan Korea. Penelitian ini menemukan hubungan yang signifikan antar infrastruktur (Transportasi, Energi dan Komunikasi) terhadap produktivitas pada negara yang menjadi objek penelitian. Hal lain yang menarik adalah penelitian ini juga menemukan pengaruh yang signifikan infrastruktur terhadap penurunan disparitas pendapatan antar wilayah di Jepang dan Korea.

Kebijakan fiskal adalah menyangkut pengeluaran (pembelian) pemerintah, transfer dan perpajakan, Perangkat kebijakan fiskal digunakan untuk mempengaruhi perekonomian sesuai dengan tujuan diinginkan melalui perubahan (naik atau turun) pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah.

Beberapa alasan mengenai perlunya pengeluaran pemerintah seperti dikemukakan oleh Hindriks dan Myles (2006) yaitu: aspek efisiensi dan aspek keadilan penggunaan sumber daya ekonomi. Dari aspek efisiensi, pengeluaran pemerintah diperlukan untuk memungkinkan perekonomian bekerja secara teratur (*minimal state*) dan mengatasi masalah kegagalan pasar (*market failure*), terutama dalam penyediaan *public good*. Dari aspek keadilan (*equity*), pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mengatasi berbagai kesenjangan dalam pendapatan, kesempatan kerja, maupun kesejahteraan

Menurut Downs (1957) dalam "*Theorem of The Median Voter*", politisi akan selalu mencari cara untuk memuaskan / memenuhi preferensi *median voter*. Oleh karena itu, pemerintah yang dipilih secara demokratik akan berusaha untuk menyenangkan golongan tersebut dengan berbagai cara seperti pemberian subsidi/transfer serta penyediaan barang publik.

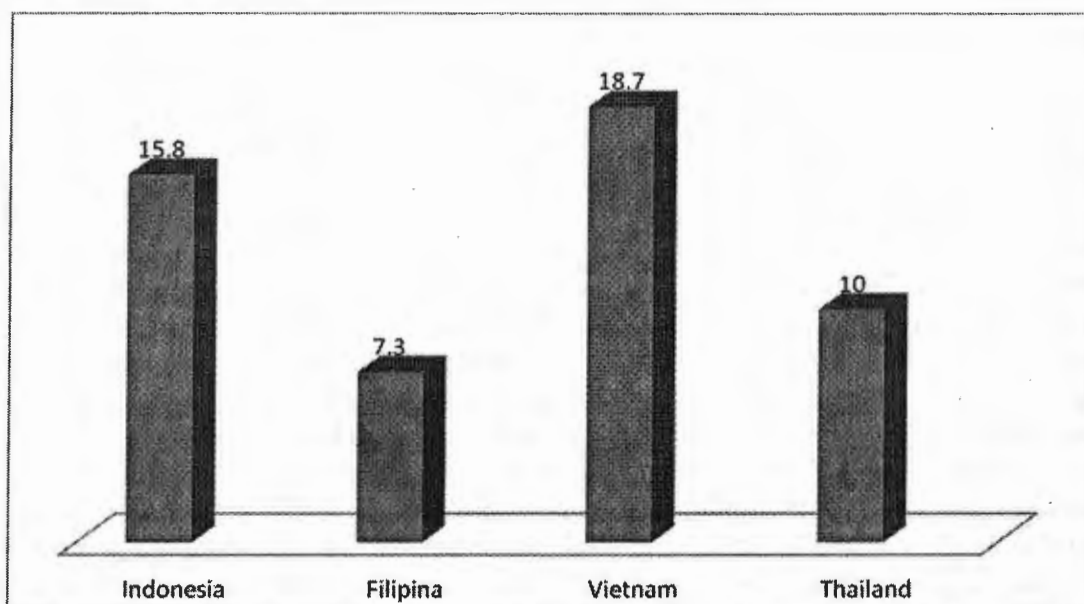
Menurut Lewis (2012) kebijakan fiskal mempunyai empat fungsi utama, yaitu: 1) fungsi alokasi anggaran seperti: alokasi fasilitas publik atau alokasi sumber daya untuk publik dan barang privat untuk tujuan pembangunan, 2) fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat agar tercapai distribusi yang merata dan adil, fungsi stabilisasi ekonomi makro seperti: kesempatan kerja, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi.

Pada kenyataan persentase anggaran infrastruktur dari APBN sangatlah kecil, pada tahun 2011 hanya 7,2 persen dari APBN sedangkan dana untuk subsidi BBM adalah 12,81 persen. Penyusunan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR yang melibatkan agenda dengan pertimbangan politik yang lebih dominan (menentukan komposisi anggaran) untuk memenuhi atau memuaskan *median voternya* sehingga persentase untuk infrastruktur lebih kecil dibandingkan dengan lainnya.

Tulisan ini mencoba menganalisis: 1) kondisi infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan tiga negara Asean seperti: Filipina, Vietnam, dan Thailand dengan pertimbangan PDB per kapita dalam kelompok yang sama yaitu *Lower middle income Countries*, 2) Menganalisis sumber-sumber dana (merubah komposisi pengeluaran dan peningkatan pendapatan) untuk meningkatkan persentase infrastruktur terhadap APBN dan PDB sehingga bisa memperbaiki kualitas infrastruktur jauh ketinggal dibandingkan dengan tiga negara Asean Filipina, Vietnam, dan Thailand.

Kondisi Infrastruktur Indonesia. Untuk mengevaluasi keadaan Infrastruktur di Indonesia dapat dilakukan dengan membandingkan dengan negara-negara Asean yang relatif sama (*Lower middle income Countries*) seperti: Philipina, Vietnam dan Thailan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan indikator infrastruktur di tiga negara tersebut seperti berikut ini:

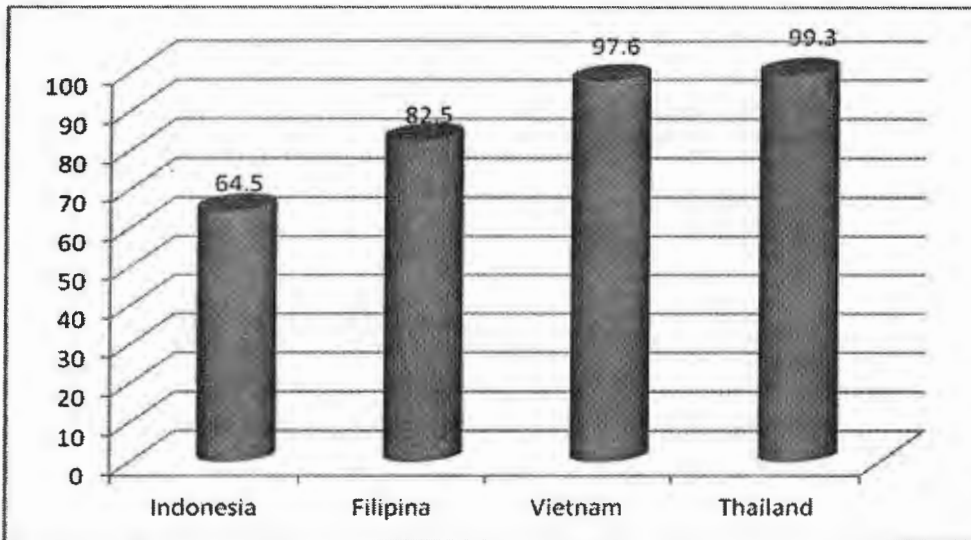
Jumlah sambungan telepon per 100 pendduk (telephone lines per 100 people) di Indonesia adalah 15,8 lebih baik dari Filipina dan Vietnam tetapi sibawah Tahilan dengan jumlah dambungan sebesar 18,7.



Gambar 1: Jumlah Sambungan Telepon per 100 pendduk (Telephone Lines per 100 people) tahun 2010

Sumber: Asian Development Bank (ADB): diolah

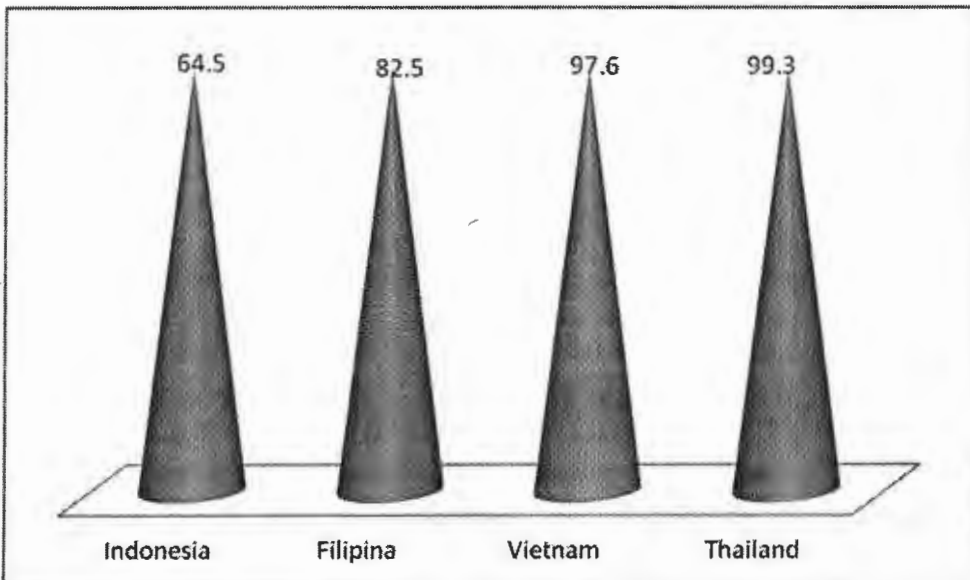
Jumlah pengguna internet per 100 penduduk *Internet users (per 100 people)* Indonesia berada pada peringkat bawah dari keempat negara Asean dengan jumlah pengguna 64,5 orang. Jumlah pengguna internet terbanyak adalah Thailan 99,3 orang per 100 orang atau hampir 100 persen penduduknya adalah pengguna internet.



Gambar 2: Jumlah Pengguna Internet per 100 Penduduk *Internet Users (per 100 people)* Tahun 2009

Sumber: Asian Development Bank (ADB): diolah

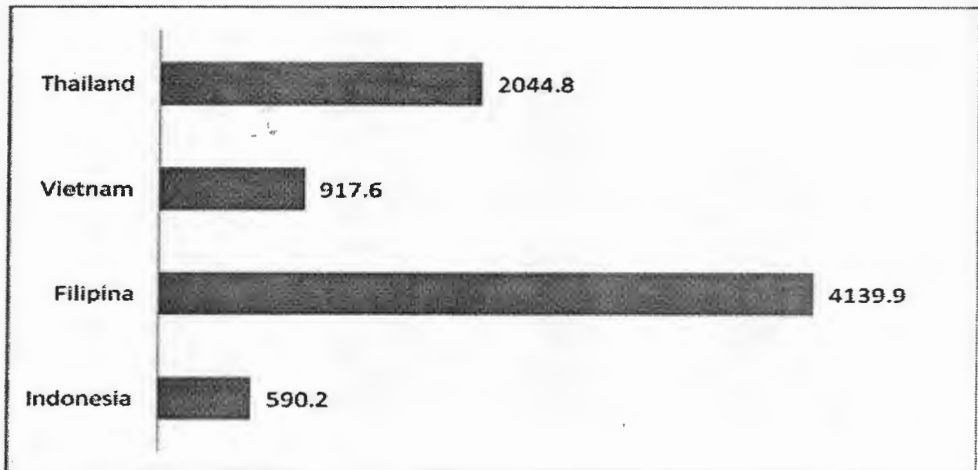
Persentase sambungan listrik dari jumlah penduduk (*Access to electricity in % of population*) Tahun 2009 di Indonesia sebesar 64,5 persen masih jauh dari ketiga negara Asean. yaitu Filipina 82,5 persen dan Vietnam dan Thailan diatas 90 persen.



Gambar 3: Persentase Sambungan Listrik dari Jumlah Penduduk (*Access to Electricity in % of Population*) Tahun 2009

Sumber: Asian Development Bank (ADB): diolah

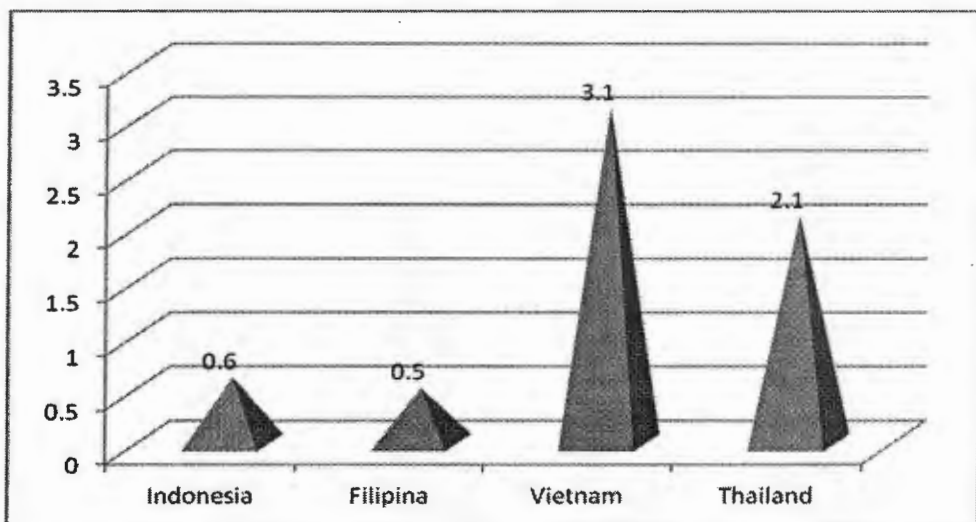
Konsumsi listrik (*Electric power consumption kWh per capita*) Indonesia terlihat paling rendah diantara diantar ketiga negara Asean lainnya. seperti terlihat pada gambar 4 berikut.



Gambar 4: Konsumsi listrik (*Electric power consumption kWh per capita*) tahun 2009

Sumber: Asian Development Bank (ADB): diolah

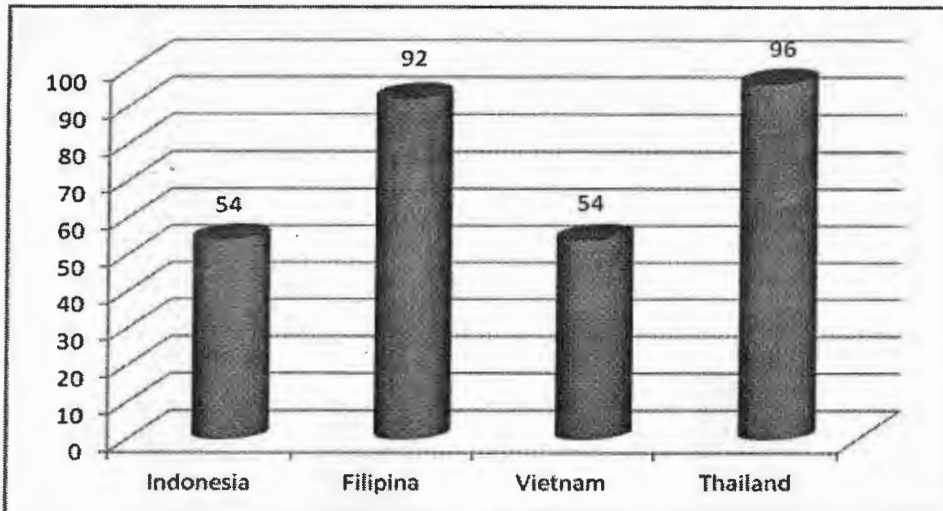
Jumlah tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk (*Hospital beds (per 1,000 people)*) Indonesia 0,6 tempat tidur hanya berada diatas Filipina dengan 0,5 tempat tidur tetapi jauh dibawah Vietnam 3,1 dan Thailan 2,1 tempat tidur. Hal ini menggambarkan rendahnya penyediaan fasilitas kesehatan di Indonesia dibandingkan tiga negara Asean lainnya.



Gambar 5: Jumlah Tempat Tidur RumahSakit per 1000 penduduk (*Hospital beds (per 1,000 people)*) tahun 2011

Sumber: Asian Development Bank (ADB): diolah

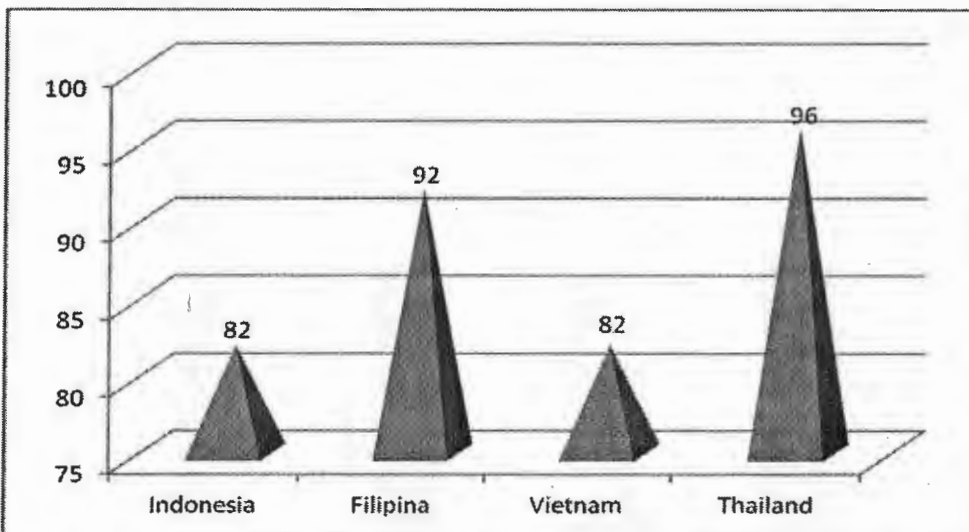
Persentase penduduk yang dapat mengakses fasilitas sanitasi dari total jumlah penduduk (*Improved sanitation facilities (% of population with access)*) Indonesia menduduki peringkat terbawah bersama Filipina dengan 54 persen dari jumlah penduduk, jauh dibawah Filipina dan Thailan dengan jumlah diatas 90 persen dari jumlah penduduk. Hal ini berarti hampir separuh penduduk Indonesia yang baru dapat mengakses sanitasi seperti terlihat pada gambar 6 berikut.



Gambar 6: Persentase penduduk yang dapat mengakses fasilitas sanitasi dari total jumlah penduduk (*Improved sanitation facilities (% of population with access)*) tahun 2011

Sumber: Asian Development Bank (ADB): diolah

Persentase jumlah penduduk yang dapat mengakses sumber air bersih (*Improved water source % of population with access*) Indonesia seperti terlihat pada gambar 7, juga menduduki peringkat terbawah bersama Filipina yaitu 82 persen. Sedangkan Thailand dan Vietnam lebih dari 90 persen penduduknya dapat mengakses sumber air bersih. Hal ini akan mempengaruhi kualitas kesehatan penduduknya.

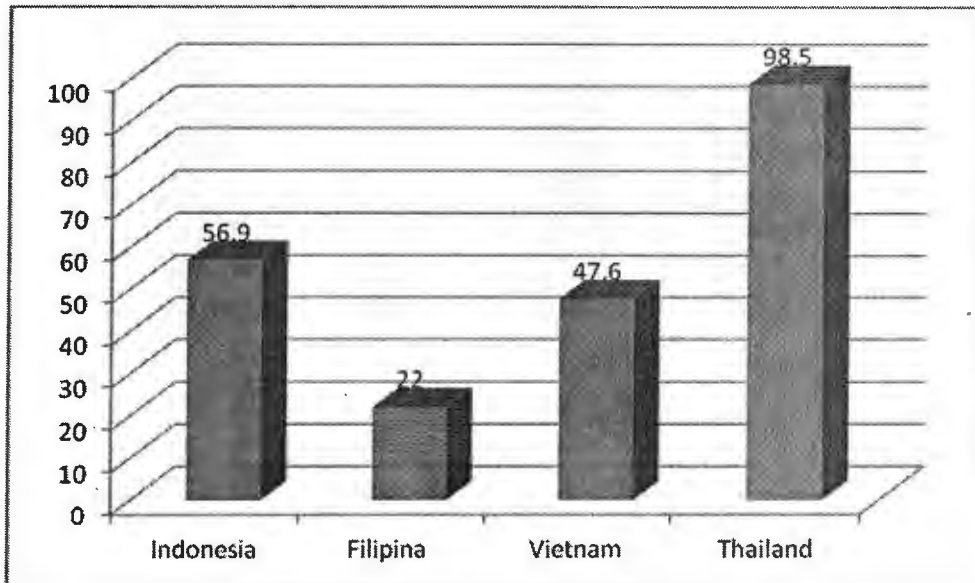


Gambar 7: Persentase Jumlah Penduduk yang Dapat Mengakses Sumber Air Bersih (*Improved water source % of population with access*) Tahun 2011

Sumber: Asian Development Bank (ADB): diolah

Persentase jalan yang diaspal dari total panjang jalan (*percentage of roads that are paved*) dibandingkan dengan ke tiga negara Asean pada gambar 8. Indoensia 56,9 persen.

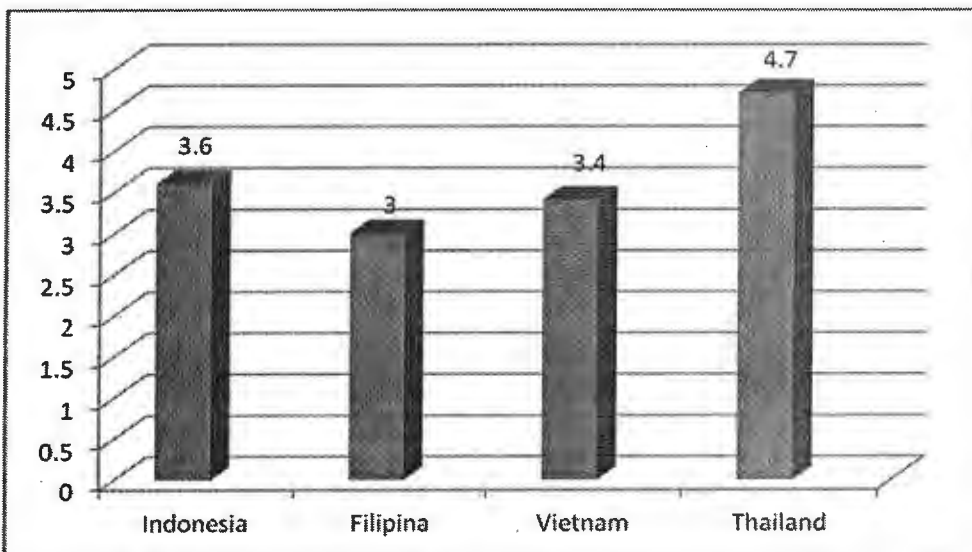
Kondisi ini lebih baik dari Vietnam dan Filipina tetapi jauh tertinggal dari Thailand dengan kondisi jalan yang diaspal sebesar 98,5 persen dari total panjang jalan.



Gambar 8: Persentase yang Jalan Diaspal dari Total Panjang Jalan (Percentage of Roads That Are Paved) Tahun 2009

Sumber: Asian Development Bank (ADB); diolah

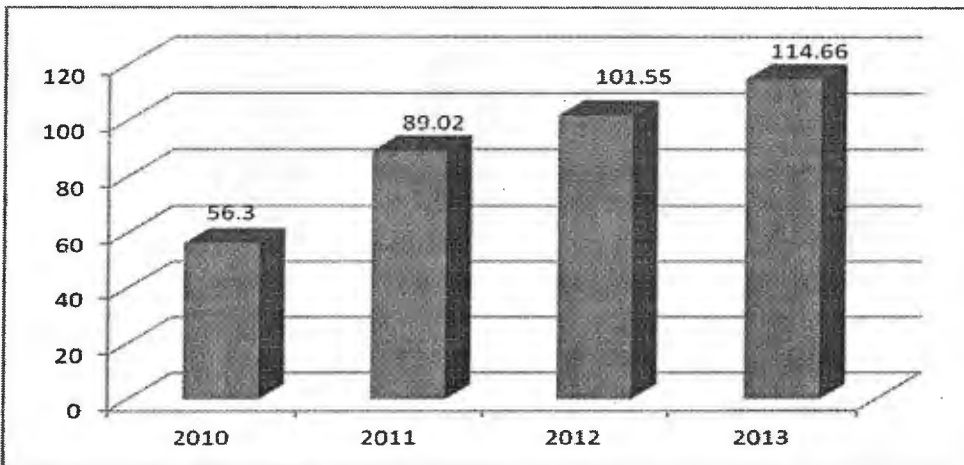
Kualitas infrastruktur pelabuhan laut (*Quality of sea port infrastructure*) tahun (2011) terlihat gambar 9, Indonesia berada diperingkat nomor dua sesudah Thailand dengan angka 3,6 (angkat 7 dengan fasilitas terbaik)



Gambar 9: Kualitas Infrastruktur Pelabuhan Laut (Quality of sea port infrastructure) tahun (2011)

Sumber: Asian Development Bank (ADB); diolah

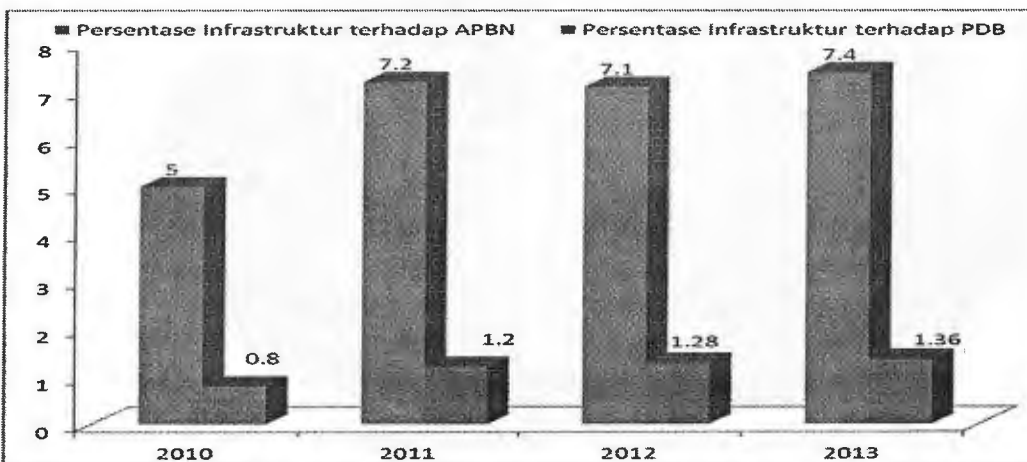
Peranan Pengeluaran Pemerintah (APBN). Peran APBN untuk menuju *social welfare* adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui penyehatan fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Belanja infrastruktur Indonesia tahun 2010–2013 (triliun rupiah) memang memperlihatkan tren yang meningkat. Peningkatan belanja infrastruktur dari tahun 2010 ke 2013 adalah sebesar 103,66 persen tetapi prosentase terhadap PDB dibandingkan dengan tiga negara Asean lainnya masih jauh tertinggal seperti terlihat pada gambar 10.



Sumber: Depkeu dan Litbang Kompas: diolah

Gambar 10: Belanja Infrastruktur Indonesia 2010 – 2013 (Triliun Rupiah)

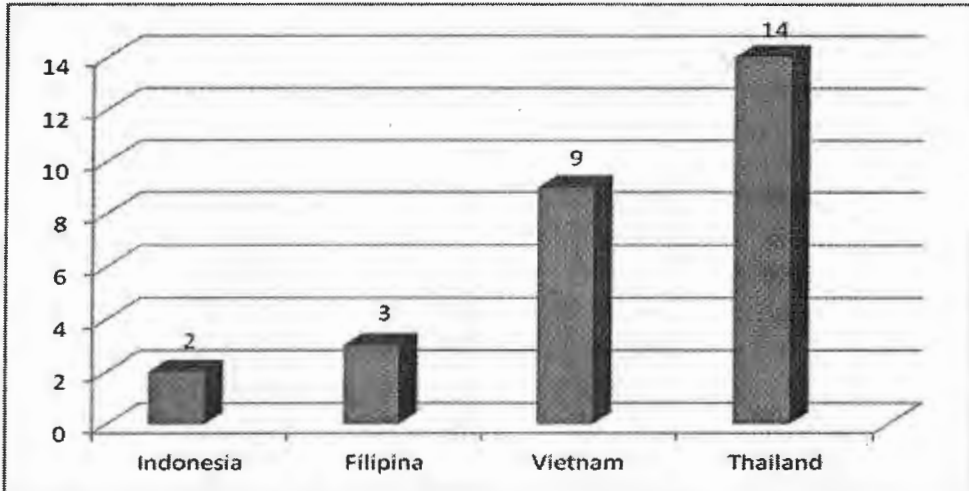
Persentase dana infrastruktur terhadap PDB dan APBN pada tahun 2010 hanya sebesar 0,8 persen, tahun 2011, tahun 2013 akan meningkat menjadi 1,36 persen dari PDB seperti terlihat pada gambar 11. Dana infrastruktur pada negara Asia Pasifik rata-rata sudah mencapai 7,2 persen (World Bank), jika dibandingkan dengan pengeluaran infrastruktur Indonesia maka persentase pengeluaran infrastruktur negara kita sangat kecil.



Gambar 11: Persentase Pengeluaran Infrastruktur terhadap PDB (*Expenditure on Infrastructure (% of GDP)*)

Sumber: Litbang Kompas (diolah)

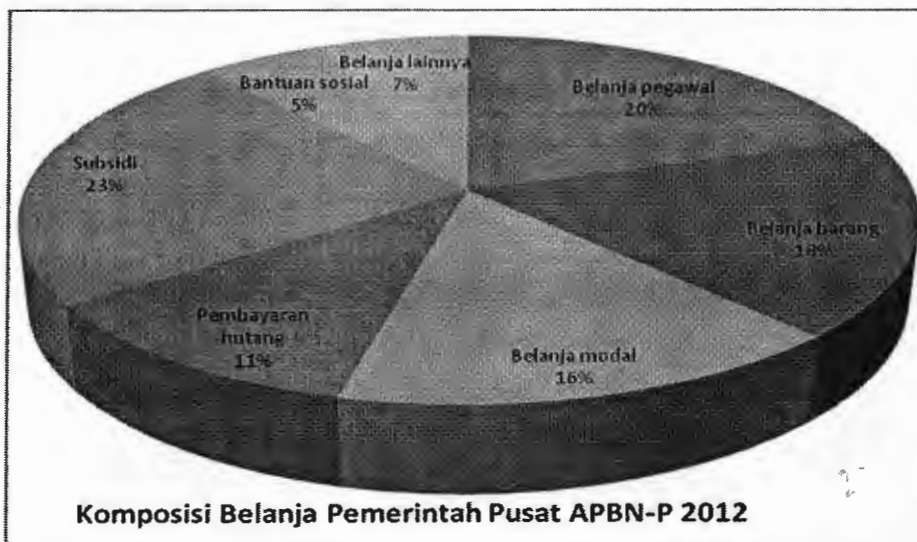
Jika pengeluaran infrastruktur (pemerintah) Indonesia dibandingkan dengan tiga negara Asean lainnya seperti terlihat gambar 12, maka persentase pengeluaran untuk infrastruktur (pemerintah dan swasta) adalah terkecil dengan persentase 2 persen dari PDB sedangkan Thailand dan Vietnam masing-masing 14 persen dan 9 persen dari PDB (melebihi rata Asia Pasifik).



Gambar 12: Persentase Pengeluaran Infrastruktur (Pemerintah dan Swata) terhadap PDB (*Expenditure on Infrastructure (% of GDP)*) pada Empat Negara Asean

Sumber: World Bank 2012 (diolah)

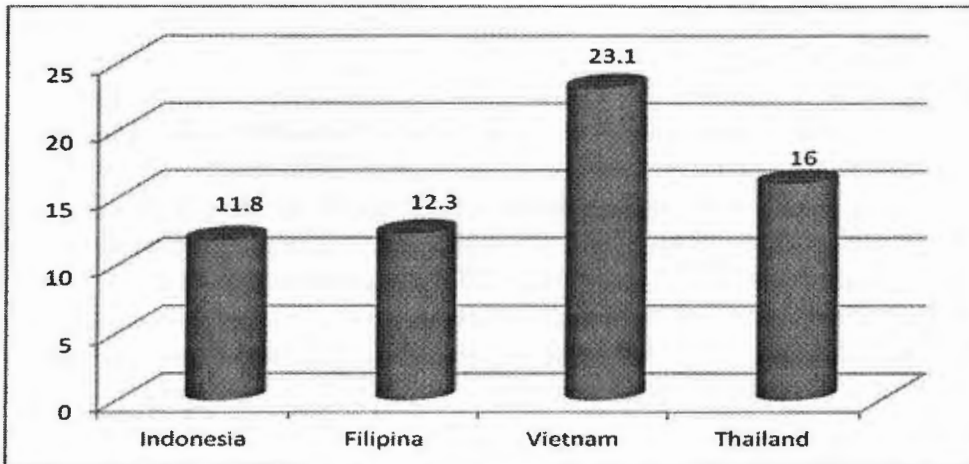
Pengeluaran infrastruktur dalam APBN dikelompokkan ke dalam belanja modal (investasi dan biaya pemeliharaan) seperti terlihat pada gambar 13, maka biaya infrastruktur lebih kecil dari belanja modal. Belanja modal pada tahun 2012 adalah 16 persen dari total belanja pemerintah pusat, lebih kecil dari pengeluaran untuk subsidi (23 persen), dan untuk belanja pegawai (20 persen).



Gambar 13: Komposisi Belanja Pemerintah Pusat APBN- 2012

Sumber: Depkeu Diolah

Sumber terbesar penerimaan dalam APBN adalah dari penerimaan pajak (2012 sebesar dilihat dari sisi penerimaan (pajak), persentase penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB atau *tax revenue* dengan tiga negara Asean lainnya. persentase penerimaan pajak Indonesia paling rendah. Persentase penerimaan pajak Indonesia sebesar 11,8 persen sedangkan Vietnam 23,1 persen dan Thailan 16 persen, seperti terlihat pada gambar 14 berikut.



Gambar 14: Persentase Penerimaan Pajak Dibandingkan dengan PDB atau *Tax Revenue* (% of GDP)

Sumber: World Bank 2012 (diolah)

PENUTUP

Kesimpulan. Pertama. Kondisi infrastruktur diukur dengan indikator-indikator infrastruktur seperti: jumlah sambungan telepon per 100 penduduk (*telephone lines per 100 people*), jumlah pengguna internet per 100 penduduk *Internet users (per 100 people)*, persentase sambungan listrik dari jumlah penduduk (*access to electricity in % of population*), persentase sambungan listrik dari jumlah penduduk (*access to electricity in % of population*), konsumsi listrik (*electric power consumption kWh per capita*), jumlah tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk (*Hospital beds (per 1,000 people)*), persentase penduduk yang dapat mengakses fasilitas sanitasi dari total jumlah penduduk (*Improved sanitation facilities (% of population with access)*), persentase jumlah penduduk yang dapat mengakses sumber air bersih (*Improved water source % of population with access*), persentase yang jalan diaspal dari total panjang jalan (*percentage of roads that are paved*), ualitas infrastruktur pelabuhan laut (*Quality of sea port infrastructure*).

Dari seluruh indikator tersebut Indonesia, infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asean kecuali : Jumlah sambungan telepon per 100 penduduk (*telephone lines per 100 people*), *Jumlah tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk (Hospital beds (per 1,000 people)*, persentase jalan yang diaspal dari total panjang jalan (*percentage of roads that are paved*), Kualitas infrastruktur pelabuhan laut (*Quality of sea port infrastructure*) hanya sedikit lebih baik dari Filipina tetapi jauh lebih jelek dibandingkan Thailan. **Kedua.** Persentase dana infrastruktur terhadap PDB, Indonesia terendah dibandingkan dengan tiga negara Asean lainnya. **Ketiga.** Tax ratio Indonesia paling rendah dibandingkan dengan tiga negara Asean lainnya yang hanya

sebesar 11,8 persen pada tahun 2012. Persentase pendapatan negara pada tahun 2012 dari penerimaan pajak adalah sebesar 78,84 persen. Berarti tax ratio akan mempengaruhi besarnya pendapatan negara dan pengeluaran untuk belanja modal termasuk infrastruktur.

Saran. Jika pemerintah ingin meningkatkan dana untuk perbaikan infrastruktur melalui belanja modal dalam APBN maka pemerintah dianjurkan untuk melakukan: **Pertama.** Merubah komposisi pengeluaran, contoh Menurut Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Suroyo (dalam berita kementerian ESDM: 2012) Tahun 2011 target subsidi BBM sebesar Rp 129,7 triliun, kenyataannya realisasi mencapai Rp 165,2 triliun, mobil pribadi menghabiskan 53% (Rp triliun). Jika pemerintah mencabut subsidi BBM untuk mobil pribadi dan digunakan untuk dana infrastruktur maka pada tahun 2011 persentase dana untuk belanja infrastruktur akan menjadi 30,1 persen atau Rp273,4 triliun. Untuk tahun 2011, pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi akan meningkatkan persentase dana infrastruktur terhadap APBN 2011 dari 7,2 persen menjadi 17,5 persen. Persentase pengeluaran infrastruktur terhadap PDB (harga berlaku) dengan pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi akan meningkatkan dari 1,2 persen menjadi 3,04 persen. **Kedua.** Meningkatkan tax ratio dari 11,8 persen menjadi 16,8 persen dari PDB akan mendapat tambahan pendapatan negara sebesar Rp371,355 triliun yang bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Rasio infrastruktur terhadap PDB akan meningkat dari 1,2 persen menjadi menjadi 5 persen.

DAFTAR RUJUKAN

- Asian Development Bank (2012). Transport, Electricity, and Communications retrieved from: <http://www.adb.org/sites/default/files/ki/2012/pdf/ki2012-rt5-transport-electricity-communications.pdf> / 20 Agustus 2012
- Asian Development Bank (2012), Economy and Output, retrieved from: <http://www.adb.org/sites/default/files/ki/2012/pdf/ki2012-rt2-economy-output.pdf>/20 Agustus 2012
- Asian Development Bank (2012), Energy and Environment, retrieved from: <http://www.adb.org/sites/default/files/ki/2012/pdf/ki2012-rt6-energy-environment.pdf>/20 Agustus 2012
- Byoungki KIM, Infrastructure Development for the Economic Development in Developing Countries: Lessons from Korea and Japan, Graduate School of International Cooperation Studies Kobe University November 2001, Vol 11
- Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy, Harper and Row, Newyork.
- Hindriks, Jean and Gareth D. Myles. (2006). Intermediate Public Economics. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jhingan, M.L. (2004). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kompas.(2012). Infrastruk Indonesia Jauh Tertinggal: diunduh dari http://www.indii.co.id/upload_file/201206210902030.Infrastruktur%20Jauh%20Tertinggal.pdf / 21 Agustus 2012
- Lewis, W. Arthur. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. Manchester School. May, 22, pp. 139-92.
- Lim, Lee Kian. (1997). Economic Growth in Malaysia: Is It Exogenous or Endogenous? www.mssanz.org.au/MODSIM97/Vol%203/Lim3.pdf

- Jajri, Idris. (2007). Determinants of Total Factor Productivity Growth in Malaysia. *Journal of Economic Cooperation*. 28, 3 (2007), 41-58.
- Lesotho, Patrick. (2006). An Investigation of The Determinants of Private Investment: The Case of Botswana. University Of The Western Cape.
- Mankiw, N. Gregory, (2007). Macroeconomics. 6th Edition. Worth Publishers. New York.
- Mill, John Stuart. (1848). Principle of Political Economy. <http://www.gutenberg.org/license>. Ebook 30107, Release Date: September 27, 2009
- Myles, Gareth D. (2001). Public Economics, G.D.Myles@ex.ac.uk.
- Nurkse, Ragnar. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries New York: Oxford University Press.
- Nurudeen, Abu and Abdullahi Usman. (2010). Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis. *Business and Economics Journal*, Volume 2010: BEJ-4. <http://astonjournals.com/bej>.
- Okpe, I.J. and G.A. Abu. (2009). Foreign Private Investment and Poverty Reduction in Nigeria (1975 to 2003). *Journal Social Science* 19(3):205-211.
- Pal, Soubarna. (2008). Does Public Investment Boost Economic Growth? Evidence from an Open-Economy Macro Model for India. Cardiff Business School Working Paper Series. E2008/24.
- Peacock, A. and J.Wiseman. (1961). The Growth in Public Expenditures in United Kingdom, Cited by Paulo Reis Mourao. 2007. *Long-Term Determinants of Portuguese Public Expenditures*. www.eurojournal.com
- Pindyck, R.S. (1993). Irreversibility, Uncertainty, and Investment. Striving for Growth after Adjustment. The World Bank.
- Ricardo, David. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. Batoche Books. Kitchener, 2001.
- Rostow, W.W. (1956). The Take-Off into Self-Sustained Growth. *Economic Journal* 66 (March): 25-48.
- Suroyo Alimoeso (2012). diunduh dari <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5629-mobil-pribadi-habiskan-subsidi-bbm-rp-779-triliun.html>/ 20 Agustus 2012
- Swan, T.W. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. *Economic Record* 32 (November):334-361. Cited in Romer 2006.
- Anonimus (2005). World Bank. East Asia Pacific Infrastructure at a Glance. Retrived http://siteresources.worldbank.org/INTEAPINFRASTRUCTURE/Resources/EAPInfra_data.pdf/ 21 Agustus 2012.
- Yanuar. (2011). Ekonomi Makro: Suatu Analisis Untuk Konteks Indonesia. Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha.